



LEMHANNAS RI

NEWSLETTER

TIADA KEBENARAN YANG MENDUA

Edisi ke-26, 20 September 2011

HALAL BI HALAL PIMPINAN DENGAN STAF LEMHANNAS RI

Masih dalam suasana Idul Fitri tahun 1432 H. Lemhannas RI pada tanggal 5 September 2011 menyelenggarakan Halal bi halal antara pimpinan, peserta PPRA XLVI, Perista dengan staf Lemhannas RI. Acara Halal bi halal diawali dengan sambutan dari Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. dihadiri oleh Wakil Gubernur, Letjen TNI Moeldoko, Sekretaris Dewan Pengarah, Dr. Ardi Partadinata, M.H., M.Si, Sekretaris Utama, Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc. Tenaga Ahli Pengajar, Pengkaji, Tenaga Profesional, Pejabat Struktural, peserta PPRA XLVI dan seluruh anggota Lemhannas RI.

Pada acara Halal bi halal ini, Gubernur Lemhannas RI mewakili segenap pimpinan Lemhannas RI menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh anggota atas kesalahan atau kekurangannya, baik yang disengaja maupun tidak selama menjalankan tugas di Lemhannas RI. Selanjutnya, Gubernur Lemhannas RI juga menyampaikan harapannya setelah berakhirnya bulan ramadhan, seluruh anggota dapat mempererat tali silaturahmi *hablumminannas* dan meningkatkan *hablumminallah*. Gubernur Lemhannas RI juga berharap kepada seluruh anggota agar dapat juga meningkatkan kinerja dalam mendharmabaktikan diri kepada bangsa dan negara.



Gubernur Lemhannas RI memimpin upacara pada acara Halal bi halal di Lemhannas RI

DAFTAR ISI

1. Halal bi Halal Pimpinan dengan Staf Lemhannas RI..... 1
2. *Roundtable Discussion*: Melestarikan Nilai-nilai Budaya Bangsa di Wilayah Perbatasan..... 2
3. Audiensi Gubernur Lemhannas RI dengan DPP KNPI..... 3
4. *Roundtable Discussion*: Pembangunan Perekonomian Berbasis Kekeluargaan yang Berjati Diri Nasional..... 4
5. *Roundtable Discussion*: Pengamanan Sumber Kekayaan Alam guna Mendukung Pembangunan Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional..... 5
6. Ceramah Panglima TNI pada PPRA XLVI..... 6
7. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Lemhannas RI dan LPP RRI..... 7
8. Pembukaan Forum Konsolidasi..... 8
9. *Roundtable Discussion*: Urgensi Amandemen UUD NRI 1945 yang Kelima guna Memperkuat Sistem Ketatanegaraan dan Mekanisme Konstitusi dalam rangka memantapkan Ketahanan Nasional..... 9
10. Audiensi Gubernur Lemhannas RI dengan Bupati Asmat..... 10
11. Upacara Bendera Tanggal 19 September 2011..... 11
12. Galeri Foto Lemhannas RI..... 12

Kemudian Halal bi halal tersebut dilanjutkan dengan acara bersalaman antara pejabat struktural, fungsional, para peserta PPRA XLVI dan seluruh staf Lemhannas RI dengan Gubernur Lemhannas RI. Acara diakhiri dengan ramah tamah.



Halal bi halal yang diselenggarakan Lemhannas RI pada tanggal 5 September 2011 di halaman tengah Lemhannas RI

ROUNDTABLE DISCUSSION:

MELESTARIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BANGSA DI WILAYAH PERBATASAN

Direktorat Pengkajian Sosial Budaya telah melaksanakan *Roundtable Discussion* (RTD) tentang “**Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Bangsa Terhadap Masyarakat di Wilayah Perbatasan guna Meningkatkan Ketahanan Nasional dalam rangka Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**” pada tanggal 18 Agustus 2011 di Gd. Astagatra Lt. III Barat Lemhannas RI. Hadir pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., Wakil Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI Moeldoko, S.IP., Sekretaris Dewan Pengarah Dr. Ardi Partadinata, MH, M.Si., Sekretaris Dewan Pengarah Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc.,

Plt. Deputy Pengkajian Strategik Irjen Pol Drs. Mochammad Rasyid Ridho, SH, MH, Deputy Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Tony S.B. Hoesodo, S.IP, M.Sc., dan Plt. Deputy Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Laksda TNI Santoso, M.Sc.

Sebagai pembicara yaitu Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI Ir. Jero Wacik, S.E., Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya UNDIP Prof. Dr. Mudjahirin Thohir, MA, dan Ketua Program Pasca Sarjana Antropologi FISIP Universitas Indonesia Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, MA, serta sebagai penanggung utamayaitu Budayawan Prof. Dr. Mudji Sutrisno dan Butet Manurung.

RTD tersebut diselenggarakan



Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI, Ir. Jero Wacik, S.E. hadir sebagai pembicara pada RTD tentang Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Bangsa Terhadap Masyarakat di Wilayah Perbatasan

sebagai respon kondisi atas bergesernya perilaku budaya bangsa, baik di perkotaan, maupun di wilayah perbatasan. Keadaan ini disebabkan antara lain: **pertama**, kehidupan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan dengan negara yang lebih maju; **kedua** berkembangnya penyakit sosial masyarakat perbatasan seperti prostitusi, perjudian dan lain sebagainya; dan **ketiga** proses pembangunan yang mengabaikan faktor budaya. Keadaan tersebut berpotensi memperlemah ketahanan nasional. Kepedulian terhadap pelestarian budaya bangsa dan jati diri bangsa (*national identity*) harus diwujudkan dengan menggali lebih jauh sekaligus mempertahankannya serta memperkuat ketahanan budaya nasional. Hal tersebut dilakukan agar mampu menangkal penetrasi budaya asing yang berdampak negatif, namun tetap memfasilitasi proses adopsi dan adaptasi budaya asing yang bernilai positif dan produktif.



Suasana RTD yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI dan diselenggarakan di Gd. Astagatra Lt. III Barat Lemhannas RI pada tanggal 18 Agustus 2011

AUDIENSI GUBERNUR LEMHANNAS RI DENGAN DPP KNPI

Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. melaksanakan diskusi dengan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) pada tanggal 22 Agustus 2011 di Ruang Tamu Pimpinan. Turut hadir pada kesempatan tersebut Sestama Lemhannas RI, Plt. Deputi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI, Karo Kerma Settama Lemhannas RI, dan Kabag Humas Settama Lemhannas RI.

Gubernur menyampaikan bahwa Lemhannas RI membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi organisasi pemuda dan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk KNPI, untuk dapat mengadakan kerjasama dengan Lemhannas RI dalam rangka meningkatkan nasionalisme di kalangan pemuda. Atas kunjungan Ketua DPP KNPI Ahmad Zaky, Gubernur sangat menyambut baik dan tiap orang dapat berperan serta secara maksimal untuk memberikan materi kebangsaan dan penanaman nasionalisme di kalangan pemuda. KNPI adalah organisasi yang didirikan pada tanggal 23 Juli 1973, merupakan organisasi yang mewadahi berkumpulnya lebih dari 70 Organisasi Karya Pemuda (OKP) dari seluruh Indonesia. Bagi Gubernur, kalangan pendidik dan pemuda termasuk KNPI adalah ujung tombak yang tepat untuk meningkatkan kesadaran berbangsa, serta berupaya merangkul semua unsur kepemudaan, baik bagi mereka yang berada di organisasi,



Gubernur Lemhannas RI melakukan audiensi dengan DPP KNPI dan didampingi oleh Sekretaris Utama dan Deputi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI di Ruang Tamu Pimpinan, Gd. Trigatra Lemhannas RI

bisnis, ataupun etnis tertentu.

Dalam kesempatan tersebut, KNPI melaporkan rencana penyelenggaraan **World Youth Forum on Peace and Harmony** di Ambon dan Jakarta pada awal Oktober 2011 dengan melibatkan segenap insan muda berasal dari 100 unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, Gerakan Pramuka, Mahasiswa, dan Pemuda dari seluruh dunia. KNPI meminta kesediaan Gubernur Lemhannas RI untuk memberikan masukan dan keterlibatannya dalam kegiatan **World Youth Forum on Peace and Harmony** dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan ketahanan nasional bagi pemuda. Gubernur berharap, para anggota KNPI yang pernah menjadi peserta Pendidikan Program

Reguler Angkatan di Lemhannas RI dapat menjadi ujung tombak dalam penanaman karakter kebangsaan dan ketahanan nasional di organisasinya dalam kegiatan **World Youth Forum on Peace and Harmony**, diharapkan hasil yang maksimal.

Melihat optimisme dan berbagai usaha yang dilakukan DPP KNPI dalam meningkatkan kesadaran berbangsa di kalangan pemuda, Gubernur Lemhannas RI menyambut baik penyelenggaraan acara **World Youth Forum on Peace and Harmony** dan berusaha untuk memberikan kontribusi dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Lemhannas RI dalam memantapkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

ROUNDTABLE DISCUSSION:**PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN BERBASIS KEKELUARGAAN YANG BERJATI DIRI NASIONAL**

K deputian Pengkajian Strategik Lemhannas RI menyelenggarakan *Roundtable Discussion* (RTD) kajian berlanjut tentang “**Pembangunan Perekonomian Berbasis Keluarga yang Berjati Diri Nasional guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam rangka Ketahanan Nasional**” pada tanggal 23 Agustus 2011 di Gd. Astagatra Lt. III Barat Lemhannas RI. Acara tersebut dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. dan dihadiri Wakil Gubernur Lemhannas RI, Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, dan Plt. Deputi Pengkajian Strategik. Selain itu hadir pula Mantan Menkop RI, Adi Sasono, Bupati Banyuasin, H. Amirudin Inoed dan Deputi bid. Pengkajian Sumber Daya UKMK Kementerian UKM, Ir. I Wayan Dipta, M.Sc. sebagai pembicara.

Dalam *keynote speech*-nya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa pemberdayaan dan penguatan ekonomi berbasis keluarga perlu ditingkatkan guna kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional. Pembangunan ekonomi berbasis keluarga yang berkualitas tersebut merupakan tanggung jawab dan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat dan kalangan swasta, melalui antara lain: pengembangan dan perbaikan kebijakan, perbaikan sarana pendukung ekonomi berbasis keluarga, pengembangan dan penyediaan skema pendanaan yang sesuai dengan karakteristik usaha ekonomi rakyat serta pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku ekonomi rakyat.



RTD tentang “**Pembangunan Perekonomian Berbasis Keluarga yang Berjati Diri Nasional guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam rangka Ketahanan Nasional**”



Para pembicara yang hadir pada RTD yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI di Gd. Astagatra Lt. III Lemhannas RI

Selain itu juga disampaikan hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan ekonomi berbasis keluarga, yaitu: proses pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan proses penyelenggaraan otonomi daerah.

Gubernur Lemhannas RI juga menyampaikan bahwa persoalan yang dihadapi ekonomi berbasis keluarga ada 2 kelompok, yaitu masalah lingkungan usaha dan masalah internal para pelaku. Oleh karena itu, diperlukan proses penguatan ekonomi berbasis keluarga yang komprehensif dan menyeluruh terhadap kedua aspek permasalahan yang disebutkan tadi. Sedangkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan daerah masih memiliki 2 permasalahan pokok, yaitu: kemampuan membangun dan pengembangan sumber-sumber kemampuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan perekonomian rakyat didaerahnya. Keberhasilan penguatan ekonomi rakyat akan menumbuhkan kegiatan perekonomian, membuka banyak kesempatan kerja didaerah serta dapat memperkokoh struktur perekonomian daerah sehingga dapat mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Lemhannas RI mengharapkan dengan diselenggarakannya RTD ini dapat melahirkan pemikiran dan gagasan strategis yang akan menyempurnakan naskah hasil kajian berlanjut tentang “**Pembangunan Perekonomian Berbasis Keluarga yang Berjati Diri Nasional guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam rangka Ketahanan Nasional**”

*ROUNDTABLE DISCUSSION:***PENGAMANAN SUMBER KEKAYAAN ALAM
GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL
DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL**

Roundtable Discussion (RTD) yang mengambil judul “Pengamanan Sumber Kekayaan Alam guna Mendukung Pembangunan Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional” diselenggarakan di Gd. Astagatra Lt. III Lemhannas RI

Rabu, pada tanggal 24 Agustus 2011 Kedeputusan Pengkajian Strategik Lemhannas RI menyelenggarakan *Roundtable Discussion* (RTD) di Gd. Astagatra Lt. III Lemhannas RI. RTD yang mengambil judul **“Pengamanan Sumber Kekayaan Alam guna Mendukung Pembangunan Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional”** dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. Hadir pada acara tersebut, Wakil Gubernur Lemhannas RI, Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, para Deputi Lemhannas RI serta para undangan lainnya.

Dalam *keynote speech*-nya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa Sumber Kekayaan Alam (SKA) merupakan salah satu modal dasar bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, negara harus mampu menguasai

dan mengelola SKA, terutama SKA yang memiliki nilai ekonomi strategis atau yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dunia telah mengalami krisis energi, hal ini memicu perebutan sumber energi yang dilakukan oleh negara tertentu, terhadap negara yang memiliki sumber energi atau SKA, baik melalui tindakan illegal maupun melalui kerjasama (kontrak). Oleh karena itu, negara kita perlu segera melakukan langkah-langkah strategis untuk mengamankan SKA yang tersebar di seluruh wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan pengamanan SKA, maka pendekatan, pencegahan, dan penindakan memberikan kontribusinya yang lebih besar dalam penerimaan negara. Gubernur Lemhannas RI berharap pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan strategis tentang pengamanan SKA tersebut dapat lahir dalam RTD yang diselenggarakan ini.

CERAMAH PANGLIMA TNI PADA PPRA XLVI

Pada tanggal 5 September 2011, Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. memberikan ceramah kepada peserta PPSA XLVI di Gd. Pancagatra Lt. III Barat dengan tema “Kebijaksanaan dan Strategi TNI dalam Perspektif Penggunaan Kekuatan guna Menjamin Kedaulatan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional”. Diawal ceramahnya beliau menjelaskan tentang perkembangan lingkungan strategis mencakup dimensi global, regional dan nasional yang merupakan skenario perkembangan yang cenderung mempengaruhi karakteristik ancaman, baik ancaman potensial maupun ancaman faktual.

Panglima TNI menegaskan bagaimanapun keadaan, situasi dan

kondisinya, TNI harus selalu siap menghadapi berbagai ancaman dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI serta keselamatan bangsa dan negara. Hal ini dikarenakan bahwa dalam jiwa TNI masih melekat 5 butir penting amanat Panglima Besar Jenderal Soedirman pada 7 Juni 1946 yaitu, **pertama**, percaya pada kekuatan sendiri; **kedua**, teruskan perjuanganmu, korban sudah banyak; **ketiga**, pertahankan rumah dan pekarangan kita sekalian; **keempat**, tentara kita jangan sekali-kali mengenal sifat menyerah kepada siapapun juga yang akan menjajah kita kembali; **kelima**, pegang teguh disiplin tentara lahir dan bathin.

Untuk menjamin kedaulatan hukum di wilayah yurisdiksi nasional



Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono S.E. memberikan ceramah kepada peserta Prrogram Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVI

dalam rangka ketahanan nasional sangat ditentukan oleh kebijaksanaan dan strategi TNI dalam membangun kekuatan, kemampuan, gelar kekuatan dan penggunaan kekuatannya. Dalam perspektif penggunaan kekuatan TNI, maka TNI mengedepankan keterpaduan trimatra dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, bersama dengan komponen cadangan dan pendukung sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta (sishanta) untuk mendukung tugas pokok TNI secara efektif dan efisien. Dari gambaran kebersamaan dalam tanggung jawab bernegara untuk membela tanah air, sesungguhnya telah tercipta sebuah ketahanan nasional didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di akhir ceramahnya mengenai kebijaksanaan dan strategi TNI dalam perspektif penggunaan kekuatan TNI, Panglima TNI membuka kesempatan diskusi dan tanya jawab.



Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVI mendengarkan ceramah dari Panglima TNI pada tanggal 5 September 2011 di Gd. Pancagatra Lt. III Barat Lemhannas RI

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA LEMHANNAS RI DAN LPP RRI



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Lemhannas RI dan LPP-RRI saat perayaan HUT ke-66 LPP-RRI

Lembaga Ketahanan Nasional RI dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) telah menyepakati kerjasama di bidang penyiaran pada tanggal 11 September 2011 di Aula LPP RRI bersamaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-66 LPP RRI. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A dan Direktur Utama LPP RRI, Dra. Niken Widiastuti, M. Si,

Penandatanganan tersebut disaksikan oleh pejabat Lemhannas RI, yaitu Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, PLT Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, PLT Deputi Bidang Pengkajian Strategik, Karo Kerma Settama Lemhannas RI, dan Taprof Bidang Sosbud

Lemhannas RI, Drs. H. Radjab Semendawai, S.H., M.Si., M.M. Dalam kesepakatan tersebut, Lemhannas RI akan bekerja sama dengan LPP-RRI dalam rangka pemberian materi ketahanan nasional dalam acara radio yang di-relay ke seluruh stasiun RRI hingga pelosok Indonesia.

Kerjasama tersebut sebagai upaya Lemhannas RI dan LPP RRI dalam meningkatkan kesadaran berbangsa bagi masyarakat dan menyatukan bangsa dan menyikapi berbagai upaya yang mampu memecah kesatuan bangsa. Untuk mendukung pelayanan LPP-RRI pada masyarakat, telah dilaksanakannya peresmian operasional dua studio Produksi MAPPI dan Mulia Puncak Jaya, serta penetapan lima studio produksi menjadi stasiun penyiaran tipe C, yaitu RRI Entikong, RRI Batam, RRI Nunukan, dan RRI Atambua.

PEMBUKAAN FORUM KONSOLIDASI

Pada tanggal 13 September 2011 diselenggarakan upacara pembukaan Forum Konsolidasi (Forkon) Pimpinan Pemerintahan Daerah Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota Angkatan V Lemhannas RI Tahun 2011 di Gd. Trigatra Lt. III Timur, Lemhannas RI. Acara pembukaan yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. dihadiri oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama Lemhannas RI, perwakilan dari para Menteri, para Deputy, para Tenaga Ahli Pengajar, Pengkaji, dan Tenaga Profesional serta para tamu undangan lainnya.

Forkon merupakan salah satu kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Lemhannas

RI. Pada dasarnya pendidikan di Lemhannas RI merupakan jawaban atas tuntutan perkembangan lingkungan strategis, ditingkat nasional maupun internasional yang mengharuskan adanya integrasi dan kerjasama yang mantap serta dinamis antar pimpinan daerah dan pimpinan pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Forkon yang diikuti oleh pimpinan pemerintahan daerah Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota juga merupakan salah satu implementasi tugas Lemhannas RI, yaitu menyiapkan dan memantapkan pimpinan tingkat nasional.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa Forkon yang berlangsung 5 minggu tersebut dirancang dalam kurikulum yang bermuara pada peningkatan



Penyematan tanda peserta kepada perwakilan peserta oleh Gubernur Lemhannas RI saat Upacara Pembukaan Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD Kabupaten Kota Angkatan V Lemhannas RI

bobot kualitas dari para pemimpin untuk memiliki tingkat standar yang lebih tangguh. Hal tersebut dilakukan karena pada era globalisasi dewasa ini, bangsa Indonesia memerlukan pemimpin yang memiliki wawasan kebangsaan dalam perspektif ketahanan nasional yang tangguh, yang mampu menghadapi tantangan dan ancaman dari dalam maupun dari luar negeri.

Gubernur Lemhannas RI diakhir sambutannya menyampaikan harapannya kepada peserta agar mengikuti Forum konsolidasi dengan serius dalam rangka meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang tercinta dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut juga sebagai usaha pemahaman dan penghayatan wawasan nusantara sebagai rambu-rambu penentuan arah dan konsepsi ketahanan nasional sebagai penentu lingkup, volume dan intensitas pembangunan di daerah merupakan kerangka pembangunan nasional secara bulat dan utuh.



Gubernur Lemhannas RI beserta jajarannya memberikan ucapan selamat kepada para peserta Forum Konsolidasi

ROUNDTABLE DISCUSSION:**“URGENSI AMANDEMEN UUD NRI 1945 YANG KELIMA GUNA MEMPERKUAT SISTEM KETATANEGARAAN DAN MEKANISME KONSTITUSI DALAM RANGKA MEMANTAPKAN KETAHANAN NASIONAL”**

Gubernur Lemhannas RI membuka Roundtable Discussion tentang “Urgensi Amandemen UUD NRI 1945 yang kelima guna Memperkuat Sistem Ketatanegaraan dan Mekanisme Konstitusi dalam rangka Memantapkan Ketahanan Nasional”

Dalam rangka mengakomodasi berbagai pemikiran dan pandangan dari berbagai pakar tentang pentingnya amandemen UUD 1945 guna memperkuat sistem ketatanegaraan dan mekanisme konstitusi sebagai bagian dari upaya konsolidasi demokrasi dalam kerangka ketahanan nasional. Lemhannas RI menyelenggarakan *Roundtable Discussion* (RTD) tentang **“Urgensi Amandemen UUD NRI 1945 yang Kelima guna Memperkuat Sistem Ketatanegaraan dan Mekanisme Konstitusi dalam rangka Memantapkan Ketahanan Nasional”** pada tanggal 14 September 2011 di Gd. Astagatra Lt. III Barat, Lemhannas RI. RTD tersebut dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. dan dihadiri pejabat

struktural dan fungsional Lemhannas RI.

Dalam *keynote speech*-nya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa amandemen UUD NRI 1945 bertujuan untuk keselarasan hubungan dan kewenangan antar lembaga negara dalam rangka konstitusi. Selain itu, berkaitan dengan pola pengaturan hubungan dan fungsi antara pusat dan pemerintahan daerah dalam rangka desentralisasi. Oleh sebab itu, Gubernur Lemhannas RI mengemukakan beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu menata hubungan antar lembaga dan mekanisme kerjanya, termasuk mengakomodasi kemitraan dengan berbagai lembaga lainnya diluar pemerintahan bagi efektivitas fungsinya. Upaya tersebut

pada akhirnya berujung kepada sistem yang akan semakin baik oleh karena didukung kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kelembagaan dengan kepemimpinan yang aspiratif, akomodatif dan partisipatif, serta budaya kerja yang kreatif dan produktif.

Di akhir sambutan, Gubernur menyampaikan harapannya bahwa amandemen UUD NRI 1945 dapat menjadi titik tolak bagi upaya mewujudkan visi dan misi Negara Republik Indonesia tahun 2025, yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur”. Oleh karena itu, Gubernur Lemhannas RI berharap dalam RTD, lahir pemikiran dan pandangan yang strategis dan akan menjadi awal dari sebuah proses amandemen UUD NRI 1945 kelima.

AUDIENSI GUBERNUR LEMHANNAS RI DENGAN BUPATI ASMAT

Senin, tanggal 12 September 2011, Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. menerima kunjungan dari Bupati Asmat, Yuvensius A. Biakai, B.A, S.H. beserta rombongan berjumlah 4 orang. Kunjungan Bupati Asmat tersebut bermaksud untuk melakukan audiensi dengan Gubernur Lemhannas RI di Ruang Tamu Pimpinan, Gd. Trigatra Lt. I. Hadir pada acara tersebut Wakil Gubernur, Sekretaris Utama, Plt. Deputy Pengkajian Strategik, dan Plt. Deputy Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI, Koordinator Pembangunan Kab. Asmat di Jakarta, dan Direktur Lemtek UI.

Kabupaten Asmat memiliki potensi domestik yang sangat besar dan telah dikenal dunia dengan kebudayaannya, tapi sayangnya dalam pengembangan ekonomi tidak termasuk dalam Koridor Ekonomi Indonesia di lingkup makro. Kabupaten Asmat merupakan jalur strategis karena dilalui oleh ALKI 3. Asmat juga memiliki potensi alam yang sangat kaya dan oleh karena itu Bupati Asmat sangat berharap agar dapat dipertimbangkan oleh pemerintah pusat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini Kabupaten Asmat belum tersentuh dalam *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 (MP3EI). Pengembangan yang dibutuhkan di kabupaten Asmat saat ini adalah pengembangan infrastruktur (transportasi, listrik, air bersih, telekomunikasi), ekonomi pertanian, perikanan dan pariwisata



Audiensi Gubernur Lemhannas RI yang didampingi oleh Wakil Gubernur dan Sekretaris Utama Lemhannas RI dengan Bupati Asmat dan bertempat di Ruang Tamu Pimpinan, Gd. Trigatra Lemhannas RI

serta pengembangan pendidikan dan kesehatan. Dengan dibangunnya Kawasan Strategi maka diharapkan nanti akan dapat dibangun bandara internasional dan pelabuhan logistik internasional, dan posisi Asmat dapat diperkuat dari aspek pertahanan dan keamanan.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Asmat menyampaikan keinginannya agar Gubernur Lemhannas RI dapat menghadiri Festival Internasional tentang Budaya suku Asmat pada tanggal 15 Oktober 2011, yang didahului dengan seminar lokal hasil kajian tanggal 13 Oktober 2011 di Timika. Selain itu juga, Bupati Asmat juga ingin Lemhannas RI turut ikut dalam pengkajian tentang **“Pengembangan Kawasan Ekonomi**

Kabupaten Asmat” yang akan dilaksanakan bersama Lemtek UI. Gubernur Lemhannas RI menyambut baik atas keinginan dari Bupati Asmat. Gubernur Lemhannas RI menyampaikan dukungannya agar Kabupaten Asmat dapat masuk ke dalam *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) guna mendukung percepatan pembangunan nasional dalam rangka ketahanan nasional. Harapan Gubernur Lemhannas RI agar para putra/putri terbaik dari Kabupaten Asmat dapat mengikuti pendidikan secara kontinu di Lemhannas RI dan dapat berpartisipasi dalam kajian sebagai penanggung utama pada *Roundtable Discussion* kajian aktual.

UPACARA BENDERA TANGGAL 19 SEPTEMBER 2011

Lemhannas RI menyelenggarakan Upacara Bendera Bulanan pada tanggal 19 September 2011. Pada upacara kali ini, selaku inspektur upacara adalah Plt. Deputy Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Irjen Pol Drs. M. Rasyid Ridho, S.H., M.H. Hadir sebagai peserta upacara adalah Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, Plt. Deputy Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, Tenaga Ahli Pengajar, Pengkaji, Tenaga Profesional, Perwakilan peserta PPRA XLVI dan beserta seluruh anggota Lemhannas RI.

Dalam amanat Gubernur Lemhannas RI yang dibacakan inspektur upacara, disampaikan beberapa kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan, diantaranya *Roundtable discussion*, Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) PPRA XLVI. Selain itu, disampaikan pula tantangan yang masih dihadapi Lemhannas RI yaitu meraih pengukuhan reformasi birokrasi



Pelaporan Pembaca UUD NRI Tahun 1945, Pengucap Sapta Marga, Tri Brata, dan Panca Prasetya KORPRI pada upacara bulanan, tanggal 19 September 2011 di halaman tengah Lemhannas RI

dan tunjangan kinerja (remunerasi). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah untuk membentuk birokrasi pemerintahan yang profesional, dengan karakteristik: adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas, dan bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Disampaikan pula dalam amanat Gubernur Lemhannas RI, bahwa sebagai aparatur negara yang baik, harus mendukung upaya-upaya reformasi birokrasi. Adapun indikator atas keberhasilan reformasi birokrasi dapat dilihat dari tidak adanya korupsi,

tidak adanya pelanggaran/sanksi, APBN dijalankan sesuai prosedur, semua program kerja selesai dengan baik, komunikasi publik berjalan baik, penggunaan jam kerja efektif dan produktif, serta penerapan *reward* dan *punishment* secara konsisten dan berkelanjutan.

Diakhir amanat Gubernur Lemhannas RI tersebut, menghimbau untuk meningkatkan disiplin, kewaspadaan, dan kepekaan terhadap perkembangan situasi yang terjadi, menunjukkan semangat kebersamaan, baik internal, maupun eksternal dengan masyarakat di lingkungan masing-masing.

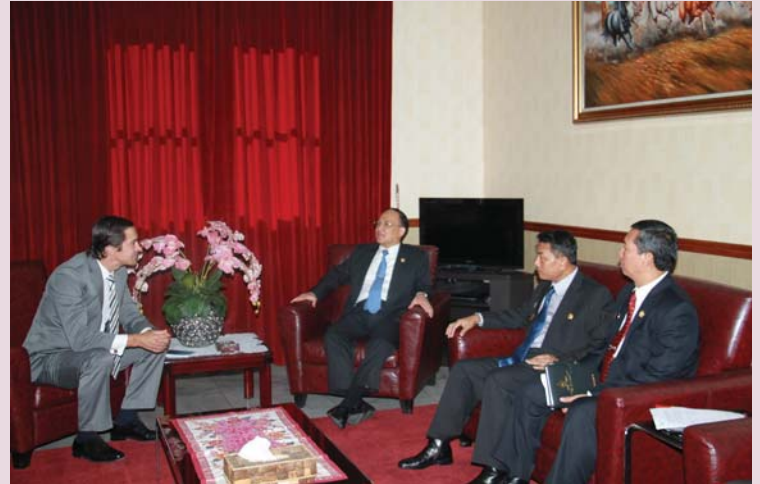


Irjen Pol Drs. M. Rasyid Ridho, S.H., M.H. membacakan amanat Gubernur Lemhannas RI pada upacara bendera bulanan

GALERI FOTO LEMHANNAS RI



Kepala Staf AD, Jenderal Pramono Edhie Wibowo memberikan ceramah kepada peserta Prgogram Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVI pada tanggal 6 September 2011 di Gd. Pancagatra Lt. III Barat Lemhannas RI



Pada tanggal 15 September 2011, Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A berdiskusi dengan Duta Besar Finlandia, H.E. Kai Sauer di Ruang Tamu Pimpinan.



Gubernur Lemhannas RI membuka Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Lemhannas RI pada tanggal 15 September 2011 yang membahas tentang penyusunan Buku Pedoman Nilai-nilai Kebangsaan Indonesia di Gd. Astagatra Lt. III Barat



Gubernur Lemhannas RI menerima penghargaan dari Pemerintah RI atas keberhasilan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2010 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di acara pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2011 pada tanggal 19 September 2011.

Pengarah : Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc.

Penanggung Jawab : Brigjen TNI Irwan Kusnadi, S.Sos., M.Sc., **Redaktur :** Megawarni Simamora, S.E, M.M

Penyunting/Editor : Kolonel Laut (P) Estu Prabowo, Letkol Adm. Drs. M. Syahril, M.M.,

Redaktur Pelaksana : Linda Purnamasari S.Sos., Endah Heliana, S.Sos., Trias Noverdi, S.S.

Desain Grafis & Fotografer : Arianto S.H., Sertu Syafrizal, Bambang Iman Aryanto, S.T.

Sekretariat : Gatot, Indiah Winarni, **Distribusi :** Letkol Inf. Sumurung, Peltu (K) Fransisca M, Letda Cba Supriyono, Supriyadi

Alamat Redaksi : Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jak-Pus (10110)

Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,

Website <http://www.lemhannas.go.id>